

ABSTRAK
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN

(Analisis UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)

Partisipasi politik masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan, salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilihan umum sebagai perwujudan dari suatu demokrasi yang menyaring seseorang yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan Pemilihan umum banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum partai peserta Pemilihan umum. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan umum. Pada tahap kampanye terjadi beberapa pelanggaran yaitu adanya “money politic” atau “pembagian barang” yang dilakukan oleh masing-masing peserta pemilihan umum.

KATA KUNCI : Kedaulatan Rakyat, Pelanggaran Pemilihan Umum

ABSTRACT

PEOPLES' PARTICIPATION AS THE HOLDER OF SOVEREIGNTY

(An Analysis of The Law Elections No. 7 of 2017)

The peoples' political participation itself is one of the actualizations forms of the democratic process. It becomes very important for the peoples in the process of political development for developing countries as Indonesia because there are rights and obligations of the community that can be done in it, one of which is the process of the direct elections of the head of a state and the mayors and regents election. The open system was used to engage peoples to be directly involved in the election process.

Election means the implementing of people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in The Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The election implementation as an embodiment of a democracy that filters politicians who will represent and bring the peoples' voice in representative institutions, it is expected that public participation in organizing the elections as governed by law election No. 7 of 2017.

In election implementation, many violations occur committed by the individual elements which participating in the election. The violation occurred at the stage of the election implementation. At the campaign stage, there were several violations namely "money politics" or "the distribution of goods" carried out by each of election.

Keyword: Peoples' Sovereignty, Election Violations